

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2016**



Balai Besar Karantina Pertanian Makassar

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2016

Jl. Perintis Kemerdekaan Km,12 Makassar
Telp.0411581323 fax: 0411581326
Email:bbkp.makassar@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Karantina Pertanian Makassar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Makassar, 23 Januari 2017
Kepala Balai,

Dr. Hermansyah, SH,MM
NIP. 195809171982021001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Neraca

III Laporan Operasional

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan atas Laporan Keuangan

A Penjelasan Umum

B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1 Pendapatan

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2 Belanja

B.2.1 Belanja Pegawai

B.2.2 Belanja Barang

B.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.2.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.2.5 Belanja Modal Lainnya

C Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1 Aset Lancar

C.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan

C.1.2 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

C.1.3 Persediaan

C.2 Aset Tetap

C.2.1 Tanah

C.2.2 Peralatan dan Mesin

C.2.3 Gedung dan Bangunan

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

- C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- C.3 Aset Lainnya
 - C.3.1 Aset Tak Berwujud
 - C.3.2 Aset Lain-lain
 - C.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
- C.4 Kewajiban Jangka Pendek
 - C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga
- C.5 Ekuitas
 - C.5.1 Ekuitas
- D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2 Beban Pegawai
 - D.3 Beban Persediaan
 - D.4 Beban Barang dan Jasa
 - D.5 Beban Pemeliharaan
 - D.6 Beban Perjalanan Dinas
 - D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1 Ekuitas Awal
 - E.2 Surplus/Defisit-LO
 - E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4.1 Koreksi Lain-lain
 - E.4.2 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
 - E.4.3 Koreksi Nilai Persediaan
 - E.4.4 Penyesuaian Nilai Aset
 - E.5 Transaksi Antar Entitas
 - E.6 Ekuitas Akhir
- F Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2 Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Makassar, 23 Januari 2017
Kepala Balai,

Dr, Hermansyah, SH,MM
NIP. 195809171982021001

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Laporan Keuangan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah direviu oleh tim reviu dalam workshop wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Makassar, 26 Januari 2017
Kepala Balai,

Dr, Hermansyah, SH,MM
NIP. 195809171982021001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2,363,407,730.00 atau mencapai 171.88% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1,375,000,000.00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp27,276,098,158.00 atau mencapai 94.69% dari alokasi anggaran sebesar Rp28,805,682,000.00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016.

Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp58,063,028,025.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp975,119,281.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp56,964,889,767.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp123,018,977.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp243,392,708.00 dan Rp57,819,635,317.00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2,366,589,035.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp26,285,229,082.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-23,918,640,047.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-3,179,748.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-23,921,819,795.00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp56,771,269,011.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-23,921,819,795.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp22,848,592.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp24,937,490,428.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp57,819,635,317.00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015

Uraian	Catatan	31 Desember 2016			31 Desember 2015
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	1,375,000,000.00	2,363,407,730.00	171.88	1,842,370,637.00
Jumlah Pendapatan		1,375,000,000.00	2,363,407,730.00	171.88	1,842,370,637.00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	11,097,071,000.00	11,062,856,649.00	99.69	10,247,897,364.00
Belanja Barang	B.2.2	10,626,770,000.00	9,970,755,191.00	93.83	12,310,199,727.00
Jumlah Belanja Operasi		21,723,841,000.00	21,033,611,840.00	96.82	22,558,097,091.00
Belanja Modal					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.2.3	635,478,000.00	634,487,818.00	99.84	1,301,569,600.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	B.2.4	6,446,363,000.00	5,607,998,500.00	87.00	563,873,500.00
Belanja Modal Lainnya	B.2.5	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
Jumlah Belanja Modal		7,081,841,000.00	6,242,486,318.00	88.15	1,883,443,100.00
Jumlah Belanja		28,805,682,000.00	27,276,098,158.00	94.69	24,441,540,191.00

Makassar, 23 Januari 2017
Kepala Balai,

Dr. Hermansyah, SH,MM
NIP. 195809171982021001

II. NERACA

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR NERACA PER 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.1	4,306,679.00	1,124,972.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.2	4,204,125.00	0.00
Persediaan	C.1.3	966,608,477.00	1,181,950,038.00
Jumlah Aset Lancar		975,119,281.00	1,183,075,010.00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	20,717,512,800.00	20,717,512,800.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	29,882,711,161.00	31,564,878,109.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	24,289,603,575.00	18,973,231,903.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	8,123,289,847.00	7,831,663,019.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	32,745,000.00	32,745,000.00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.6	-20,577,209,429.00	-19,190,281,586.00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.6	-2,434,457,577.00	-2,006,495,580.00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.6	-3,069,305,610.00	-2,303,774,235.00
Jumlah Aset Tetap		56,964,889,767.00	55,619,479,430.00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1	18,000,000.00	18,000,000.00
Aset Lain-lain	C.3.2	2,316,654,766.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.3.3	-2,206,760,789.00	0.00
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		-4,875,000.00	0.00
Jumlah Aset Lainnya		123,018,977.00	18,000,000.00
Jumlah Aset		58,063,028,025.00	56,820,554,440.00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	243,392,708.00	49,285,429.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		243,392,708.00	49,285,429.00
Jumlah Kewajiban		243,392,708.00	49,285,429.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	57,819,635,317.00	56,771,269,011.00
Jumlah Ekuitas		57,819,635,317.00	56,771,269,011.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		58,063,028,025.00	56,820,554,440.00

Makassar, 23 Januari 2017
Kepala Balai,

Dr. Hermansyah, SH,MM
NIP. 195809171982021001

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015**

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	2,366,589,035.00	1,810,801,671.00
JUMLAH PENDAPATAN		2,366,589,035.00	1,810,801,671.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	11,248,716,649.00	10,247,897,364.00
Beban Persediaan	D.3	1,370,330,616.00	1,525,348,692.00
Beban Barang dan Jasa	D.4	4,215,120,890.00	5,124,772,314.00
Beban Pemeliharaan	D.5	1,875,417,408.00	2,514,642,220.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2,817,702,223.00	3,461,134,775.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	4,757,941,296.00	4,687,935,314.00
JUMLAH BEBAN		26,285,229,082.00	27,561,730,679.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-23,918,640,047.00	-25,750,929,008.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	0.00	30,472,000.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	402.00	205,408.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	3,180,150.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-3,179,748.00	30,677,408.00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-23,921,819,795.00	-25,720,251,600.00

Makassar, 23 Januari 2017
Kepala Balai,

Dr. Hermansyah, SH,MM
NIP. 195809171982021001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
EKUITAS AWAL	E.1	56,771,269,011.00	59,982,040,293.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-23,921,819,795.00	-25,720,251,600.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0.00	0.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Lain-lain	E.4.1	0.00	1,151,400.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.2	-31,865,708.00	-109,856,339.00
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.3	54,714,300.00	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.4	0.00	-966,547.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	24,937,490,428.00	22,619,151,804.00
EKUITAS AKHIR		57,819,635,317.00	56,771,269,011.00

Makassar, 23 Januari 2017
Kepala Balai,

Dr. Hermansyah, SH,MM
NIP. 195809171982021001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Karantina Pertanian Makassar

Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Karantina Pertanian Makassar

A. Motto, Visi dan Misi Balai Besar Karantina Pertanian Makassar

1. Motto

"Bersama Anda Melindungi Negeri"

2. Visi

Visi dari Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar adalah sebagai berikut:

"Menjadi karantina yang handal dan akuntabel dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati guna pencapaian swasembada pangan dan mendorong akselerasi ekspor serta ketahanan dan keamanan pangan di Sulawesi Selatan"

3. Misi

Misi dari Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tata kelola sistem perkarantinaan dalam melindungi sumber daya hayati hewan/tumbuhan dari ancaman HPHK/OPTK dan pangan segar dari cemaran nuklir, biologi, dan kimia.
- b. Meningkatkan daya saing komoditas hewan dan tumbuhan dalam perdagangan domestik dan internasional.
- c. Mendorong terwujudnya peran karantina dalam akselerasi ekspor kakao dan komoditas unggulan pertanian lainnya di Sulawesi Selatan yang akseptabel dan mampu bersaing di pasar internasional.
- d. Mewujudkan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan dengan mengimplementasikan secara konsisten ISO 9001:2008/SNI 19-9001-2008.
- e. Meningkatkan kompetensi sebagai Laboratorium Penguji (Testing Laboratory) mengimplementasikan secara konsisten SNI 17025:2008.
- f. Meningkatkan kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan.
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana, teknologi yang aplikatif dengan sistem komputerisasi.

B. Tugas dan Fungsi Balai Besar Karantina Pertanian Makassar

1. Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati, hewani, nabati.

2. Fungsi

- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;

- b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa HPHK dan OPTK;
- c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati
- f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. Pengelolaan system informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati;
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Karantina Pertanian Makassar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Karantina Pertanian Makassar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Karantina Pertanian Makassar yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Karantina Pertanian Makassar telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	1,375,000,000.00	1,375,000,000.00
Jumlah Pendapatan	1,375,000,000.00	1,375,000,000.00
Belanja		
Belanja Pegawai	10,741,181,000.00	11,097,071,000.00
Belanja Barang	11,541,622,000.00	10,626,770,000.00
Belanja Modal	7,342,126,000.00	7,081,841,000.00
Jumlah Belanja	29,624,929,000.00	28,805,682,000.00

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2,363,407,730.00 atau mencapai 171.88% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1,375,000,000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	0.00	555,276.00	0.00
Pendapatan Jasa	1,375,000,000.00	2,327,213,760.00	169.25
Pendapatan Iuran dan Denda	0.00	35,638,292.00	0.00
Pendapatan Lain-lain	0.00	402.00	0.00
Jumlah	1,375,000,000.00	2,363,407,730.00	171.88

Realisasi Pendapatan TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 28.28% dibandingkan TA 2015. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	.%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	555,276.00	33,337,994.00	-98.33
Pendapatan Jasa	2,327,213,760.00	1,808,827,235.00	28.66
Pendapatan Iuran dan Denda	35,638,292.00	0.00	0.00
Pendapatan Lain-lain	402.00	205,408.00	-99.80
Jumlah	2,363,407,730.00	1,842,370,637.00	28.28

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2016 adalah sebesar Rp27,276,098,158.00 atau 94.69% dari anggaran belanja sebesar Rp28,805,682,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2016

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	11,097,071,000.00	11,064,688,784.00	99.71
Belanja Barang	10,626,770,000.00	9,970,755,191.00	93.83
Belanja Modal	7,081,841,000.00	6,248,875,518.00	88.24
Total Belanja Kotor	28,805,682,000.00	27,284,319,493.00	94.72
Pengembalian Belanja		-8,221,335.00	0.00
Total Belanja	28,805,682,000.00	27,276,098,158.00	94.69

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	.%
Kegiatan			
Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	28,805,682,000.00	27,284,319,493.00	94.72
Total Belanja Kotor	28,805,682,000.00	27,284,319,493.00	94.72
Pengembalian Belanja		-8,221,335.00	0.00
Total Belanja	28,805,682,000.00	27,276,098,158.00	94.69

Dibandingkan dengan Tahun 2015, Realisasi Belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 11.60% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja Pegawai Mengalami peningkatan sebesar 7,96 % karena adanya kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, dan Perubahan Status pegawai dan Tunjangan Keluarga
2. Belanja Modal Mengalami Kenaikan sebesar 231,44 % karena adanya Pengembangan Kantor Induk BBKP Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 12 Makassar,

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	.%
Belanja Pegawai	11,062,856,649.00	10,247,897,364.00	7.95
Belanja Barang	9,970,755,191.00	12,310,199,727.00	-19.00
Belanja Modal	6,242,486,318.00	1,883,443,100.00	231.44
Total Belanja	27,276,098,158.00	24,441,540,191.00	11.60

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp11,062,856,649.00 dan Rp10,247,897,364.00. Realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 7.95% dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Kenaikan Pangkat, Tunjangan Keluarga, dan Kenaikan Gaji Berkala PNS
2. Belanja Lembur PNS mengalami peningkatan sebesar 84,32 % dari realisasi sebesar Rp.1.026962.000 dari tahun sebelumnya realisasi hanya Rp.557.169.000.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10,037,726,784.00	9,690,751,730.00	3.58
Belanja Lembur	1,026,962,000.00	557,169,000.00	84.32
Jumlah Belanja Kotor	11,064,688,784.00	10,247,920,730.00	7.97
Pengembalian Belanja Pegawai	-1,832,135.00	-23,366.00	7,741.03
Jumlah Belanja	11,062,856,649.00	10,247,897,364.00	7.95

B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 9,970,755,191.00 dan Rp 12,310,199,727.00. Realisasi belanja barang TA 2016 mengalami penurunan sebesar -19.00% dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja Barang Non Operasional mengalami penurunan sebesar -74,12% karena adanya penghematan DIPA yang adanya pagu yang diblokir.
2. Belanja Persediaan mengalami Peningkatan karena adanya perubahan MAK khusus persediaan yaitu semua barang persediaan di khususnya ke MAK.5218. untuk meningkatkan tertib administrasi bidang persediaan.
3. Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dalam Negeri Mengalami Penurunan karena adanya Penghematan yang dianggap perlu.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2,481,898,663.00	2,389,444,800.00	3.87
Belanja Barang Non Operasional	872,916,275.00	3,372,606,275.00	-74.12
Belanja Barang Persediaan	1,604,236,354.00	283,478,500.00	465.91
Belanja Jasa	856,262,798.00	909,555,487.00	-5.86
Belanja Pemeliharaan	1,337,738,878.00	1,893,979,890.00	-29.37
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2,817,702,223.00	3,461,134,775.00	-18.59
Jumlah Belanja Kotor	9,970,755,191.00	12,310,199,727.00	-19.00
Pengembalian Belanja Barang	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	9,970,755,191.00	12,310,199,727.00	-19.00

B.2.3 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 634,487,818.00 dan Rp1,301,569,600.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 mengalami penurunan sebesar -51.25% dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh Pembelian peralatan dan mesin Sepeda motor 6 unit, PC unit 15(limabelas) unit, laptop 3(tiga) unit dan Printer 15 unit. Meja Kerja Kayu 10(sepuluh) unit, Kursi Besi metal, 18(delapanbelas) unit, Desktop xray, Televisi,television Control Operasional masing masing 1 (satu) unit

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	634,487,818.00	1,301,569,600.00	-51.25
Jumlah Belanja Kotor	634,487,818.00	1,301,569,600.00	-51.25
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	634,487,818.00	1,301,569,600.00	-51.25

Posisi Modal Peralatan dan Mesin di Neraca Tahun Anggaran 2016

Uraian Jenis Peralatan dan Mesin	Nilai Rp	
Saldo Awal 01 Januari 2016	31.564.878.109	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	634.730.341	
Penghentian dari Penggunaan	-2.316.897.289	
Saldo Akhir PM	29.882.711.161	

B.2.4 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5,607,998,500.00 dan Rp563,873,500.00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 894.55% dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh Pembangunan/ Pengembangan Gedung kantor Induk Jl.Perintis Kemedekaan km. 12 Makassar Rp.2.391.730.900. , Pengembangan Laboratorium Daya, Rp.162.220.000, dan Pengembangan Kantor Wilker Bone Rp.64.542.013, Pengembangan Kandang di Wilker Bajoe Bone Rp.1.667.601.050, Laboratorium Bajoe Bone RP. 386.134.736 serta pengembangan kandang di wilker Jeneponto Rp.876.087.800.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,614,387,700.00	565,024,900.00	893.65
Jumlah Belanja Kotor	5,614,387,700.00	565,024,900.00	893.65
Pengembalian Belanja	-6,389,200.00	-1,151,400.00	454.91
Jumlah Belanja	5,607,998,500.00	563,873,500.00	894.55

Rincian Penambahan / Pengurangan Nilai Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2016

Uraian Gedung dan Bangunan di Neraca	Nilai Rp	
Saldo Awal 01 Januari 2016	18.973.231.903	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.923.788.655	
Koreksi Nilai GB	1.607.416.983	
SALDO AKHIR GB	24.289.603.575	

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4,306,679.00 dan Rp1,124,972.00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	4.306.679	1.124.972
Jumlah	4.306.679	1.124.972

C.1.2 BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4,204,125.00 dan Rp0.00.

Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	4.204.125	0.00
Sewa di pelabuhan Paotere 1 Januari-30 September 2017		
dst...		
Jumlah	4.204.125	0.00

C.1.3 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp966,608,477.00 dan Rp1,181,950,038.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Persediaan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Barang Konsumsi	293,254,308.00	386,106,143.00
Bahan untuk Pemeliharaan	2,905,000.00	15,206,500.00
Suku Cadang	424,554,478.00	491,004,470.00
Bahan Baku	245,894,691.00	289,632,925.00
Jumlah	966,608,477.00	1,181,950,038.00

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp20,717,512,800.00 dan Rp20,717,512,800.00.

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	1,287.00m ²	Jl.KARANTINA Rt.-, PANAKUKKANG	1,285,851,800.00
2.	3,961.00m ²	KAPASA RAYA NO.17 DAYA BIRINGKANAYA	2,392,444,000.00
3.	417.00m ²	Jl. Bandara Baru -, MANDAI Makassar	192,913,600.00
4.	322.00m ²	YOS SUDARSO Rt.-, TANETE RIATTANG	141,358,000.00
5.	297.00m ²	POROS KAB BONE Rt.01/04, KAJUARA	106,000,000.00
6.	1,122.00m ²	PEL. LAUT Rt.-, BATANG JENEPONTO	36,000,000.00
7.	1,000.00m ²	BANDARA BARU Rt.001, MANDAI	412,800,000.00
8.	837.00m ²	PEL. SINJAI Rt.002, SINJAI UTARA	436,800,000.00
9.	506.00m ²	YOS SUDARSO Rt.003, UJUNG BULU	90,000,000.00
10.	6,000.00m ²	DUSUN PATTENE Rt.005, MAROS BARU	436.799.100.00
11.	4,000.00m ²	PATTENE Rt., MAROS	295,200,000.00
12.	91.00m ²	NUSANTARA NO.444 Rt., UJUNG TANAH	234,789,000.00
13.	5,000.00m ²	VETERAN/ Rt., TANETE RIATTANG	876,000,000.00
14.	7,759.00m ²	P.KEMERDEKAAN NO.12 , BIRINGKANAYA	13,642,649,700.00
15.	1,798.00m ²	MAROS BARU Rt., TAMAPPA DUAE	137,907,600.00
Jumlah			20,717,512,800.00

Nilai saldo Tanah pada Neraca SAIBA sama dengan nilai total KIB tanah pada aplikasi SIMAKBMN.

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp29,882,711,161.00 dan Rp31,564,878,109.00.

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp24,289,603,575.00 dan Rp18,973,231,903.00.

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp8,123,289,847.00 dan Rp7,831,663,019.00.

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp32,745,000.00 dan Rp32,745,000.00.

C.2.6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp-26,080,972,616.00 dan Rp-23,500,551,401.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	29,882,711,161.00	-20,577,209,429.00	9,305,501,732.00
2.	Gedung dan Bangunan	24,289,603,575.00	-2,434,457,577.00	21,855,145,998.00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8,123,289,847.00	-3,069,305,610.00	5,053,984,237.00
4.	Aset Tetap Lainnya	32,745,000.00	0.00	32,745,000.00
Akumulasi Penyusutan		62,328,349,583.00	-26,080,972,616.00	36,247,376,967.00

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp18,000,000.00 dan Rp18,000,000.00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	18,000,000.00
Jumlah	18,000,000.00

C.3.2 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2,316,654,766.00 dan Rp0.00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Karantina Pertanian Makassar serta dalam proses penghapusan dari BMN. Aset yang sudah di usulkan penghapusannya senilai Rp. 1.642.502.425,- sedangkan senilai Rp. 674.152.341. belum di usulkan penghapusannya. Surat pengusulan penghapusan terlampir.

C.3.3 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp-2,211,635,789.00 dan Rp0.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	18,000,000.00	-4,875,000.00	13,125,000.00
2.	Aset Lain-lain	2,316,654,766.00	-2,206,760,789.00	109,893,977.00
	Akumulasi Penyusutan	2,334,654,766.00	-2,211,635,789.00	123,018,977.00

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp243,392,708.00 dan Rp49,285,429.00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	185,860,000.00	0.00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	57,532,708.00	49,285,429.00
Jumlah	243,392,708.00	49,285,429.00

C.5 EKUITAS

C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp57,819,635,317.00 dan Rp56,771,269,011.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2,366,589,035.00 dan Rp1,810,801,671.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	35,638,292.00	0.00	0.00
Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	2,330,395,467.00	1,807,935,677.00	28.90
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	555,276.00	2,865,994.00	-80.63
Jumlah	2,366,589,035.00	1,810,801,671.00	30.69

Adanya peningkatan pendapatan sensor karantina disebabkan oleh karena kebijakan perubahan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan PP nomor 35 tahun 2016.

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp11,248,716,649.00 dan Rp11,248,716,649.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	6,925,839,120.00	6,310,298,420.00	9.76
Beban Pembulatan Gaji PNS	93,831.00	92,192.00	1.78
Beban Tunj. Anak PNS	136,152,538.00	133,414,218.00	2.05
Beban Tunj. Beras PNS	382,208,700.00	378,353,820.00	1.02
Beban Tunj. Fungsional PNS	791,500,000.00	720,090,000.00	9.92

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	6,925,839,120.00	6,310,298,420.00	9.76
Beban Tunj. PPh PNS	99,387,414.00	157,417,456.00	-36.86
Beban Tunj. Struktural PNS	140,465,000.00	141,785,000.00	-0.93
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	503,037,046.00	486,139,258.00	3.48
Beban Tunjangan Umum PNS	125,945,000.00	129,425,000.00	-2.69
Beban Uang Lembur	1,026,962,000.00	557,169,000.00	84.32
Beban Uang Makan PNS	1,117,126,000.00	1,233,713,000.00	-9.45
Jumlah	11,248,716,649.00	10,247,897,364.00	9.77

Adanya perubahan peningkatan beban uang lembur, Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Fungsional, dan Gaji Pokok PNS.

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1,370,330,616.00 dan Rp1,525,348,692.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	531,682,175.00	741,219,050.00	-28.27
Beban Persediaan konsumsi	834,081,441.00	781,606,642.00	6.71
Beban persediaan lainnya	4,567,000.00	2,523,000.00	81.02
Jumlah	1,370,330,616.00	1,525,348,692.00	-10.16

Adanya penghematan beban persediaan terutama menyangkut Persediaan Bahan Baku,

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4,215,120,890.00 dan Rp5,124,772,314.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Bahan	846,416,275.00	1,890,080,050.00	-55.22
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0.00	46,345,000.00	-100.00
Beban Barang Operasional Lainnya	12,500,000.00	0.00	0.00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	221,670,000.00	196,000,000.00	13.10
Beban Honor Output Kegiatan	26,500,000.00	114,570,000.00	-76.87
Beban Jasa Lainnya	19,700,000.00	19,700,000.00	0.00
Beban Jasa Profesi	28,500,000.00	45,080,000.00	-36.78
Beban Keperluan Perkantoran	1,701,569,663.00	1,571,800,150.00	8.26
Beban Langganan Air	5,422,175.00	13,434,730.00	-59.64
Beban Langganan Listrik	592,380,216.00	594,564,864.00	-0.37
Beban Langganan Telepon	128,260,436.00	101,762,186.00	26.04
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	510,159,000.00	358,017,000.00	42.50
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00
Beban Sewa	86,043,125.00	137,418,334.00	-37.39
Jumlah	4,215,120,890.00	5,124,772,314.00	-17.75

<Penghematan terutama untuk keperluan sehari-hari perkantoran yang dianggap tidak terlalu mendesak.

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1,875,417,408.00 dan Rp2,514,642,220.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam

kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	362,684,878.00	659,468,540.00	-45.00
Beban Pemeliharaan Jaringan	0.00	50,000,000.00	-100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	860,609,400.00	1,054,826,350.00	-18.41
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99,944,600.00	129,685,000.00	-22.93
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	43,514,700.00	106,267,100.00	-59.05
Beban Persediaan suku cadang	508,663,830.00	514,395,230.00	-1.11
Jumlah	1,875,417,408.00	2,514,642,220.00	-25.42

Penghematan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, dan Pindahan Beban Pemeliharaan ke Persediaan bahan untuk pemeliharaan.

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2,817,702,223.00 dan Rp3,461,134,775.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	0.00	9,330,000.00	-100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,315,500,000.00	1,303,530,000.00	0.92
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,502,202,223.00	1,204,848,875.00	24.68
Beban Perjalanan Tetap	0.00	943,425,900.00	-100.00
Jumlah	2,817,702,223.00	3,461,134,775.00	-18.59

<Beban Perjalanan Tetap yang seharusnya ada di MAK Tahun 2015 dihilangkan di tahun 2016, dan Beban Perjalanan Biasa tidak ada di tahun 2016

D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4,757,941,296.00 dan Rp4,687,935,314.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Amortisasi Software	2,625,000.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	461,729,128.00	419,800,940.00	9.99
Beban Penyusutan Irigasi	35,855,548.00	35,797,616.00	0.16
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	163,958,380.00	134,795,696.00	21.64
Beban Penyusutan Jaringan	493,265,453.00	493,219,670.00	0.01
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	45,590,570.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,554,917,217.00	3,604,321,392.00	-1.37
Jumlah	4,757,941,296.00	4,687,935,314.00	1.49

Beban Penyusutan dari Aplikasi simak BMN bersifat tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

D.8 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0.00	0.00	0.00
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-3,180,150.00	0.00	0.00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0.00	27,000,000.00	-100.00
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0.00	3,472,000.00	-100.00
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0.00	204,000.00	-100.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	402.00	1,408.00	-71.45
Jumlah	-3,179,748.00	30,677,408.00	-110.37

Adanya Dokumen KH yang masuk dalam persediaan karena rusak/ usang, maka di hentikan penggunaannya dan dikeluarkan dari aplikasi persediaan.

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp56,771,269,011.00 dan Rp56,771,269,011.00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp-23,921,819,795.00 dan Rp-25,720,251,600.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

E.4.1 KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp1,151,400.00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4.2 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp-31,865,708.00 dan Rp-109,856,339.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4.3 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp54,714,300.00 dan Rp0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

incian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2016.

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Suku Cadang	54,714,300.00
Jumlah	54,714,300.00

E.4.4 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp-966,547.00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp24,937,490,428.00 dan Rp22,619,151,804.00. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2016.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	27,276,098,158.00
Diterima dari Entitas Lain	-2,363,407,730.00
Transfer Masuk	24,928,750.00
Jumlah	24,937,490,428.00

E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp57,819,635,317.00 dan Rp56,771,269,011.00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Adanya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan di Neraca karena setoran yang dilakukan oleh Pemakai jasa Karantina Baru ditetapkan sebagai penerimaan setelah tanggal neraca. Senilai Rp. 4.306.679. dengan Nomor NTPN

No	Tgl Bayar	NTPN	NTB	Nilai Setor Rp
1	3/1/2017	8B634829SO7JF3P	000000518498	215,735
2	3/1/2017	2124D82AUPSA3S3P	000000527880	5,450
3	3/1/2017	6176C82913FCI83P	000000510139	627,750
4	3/1/2017	6AEC58AG8ARH763P	000000133533	313,000
5	4/1/2017	8BBCA0CG3VKCVTS9	000000218385	119,500
6	4/1/2017	897020P4J1D6VLS9	000000698949	178,294
7	3/1/2017	6606F8AGSDF4G33F	000000138639	1,179,800
8	5/1/2017	E4E271MY79GRNAKP	000000455260	1,593,950
9	5/1/2017	1EFA16OF5L95SOKL	170105448537	73,200
				4,306,679

Beban Uang Makan PNS yang seharusnya di Bebaskan pada Bulan Desember 2016, Karena tidak mencukupinya uang makan maka menjadi utang kepada Pihak Ketiga dengan nilai sebesar Rp.185.860.000, dengan MAK 521129.

Beban Langganan Listrik MAK 522111 Untuk Pemakaian Bulan Desember sebesar Rp.49.324.705,-

Beban Langganan Telepon MAK 522112 Untuk Pemakaian Bulan Desember sebesar Rp.7.802.933,-

Beban Langganan AIR MAK 522113 Untuk Pemakaian Bulan Desember sebesar Rp.405.070,-

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Telah di buat memo Penyesuaian untuk Pembayaran Listrik Pemakaian Bulan Desember, Memo Penyesuaian Pembayaran bulan Desember Telepon, Air, Memo Penyesuaian untuk beban Pegawai uang Makan PNS bulan Nopember dan Desember 2016. terlampir